

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Komoditi Perikanan di Sulawesi Selatan

The compliance of FQIA Makassar's customers in South Sulawesi

Mohammad Zamrud✉, Fatima Tayang, Muhammad Jamil, Sitti Chadidjah

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
Jl. Dakota No. 24 Sudiang, Makassar

✉Corresponding author: zamrud_bangkep@yahoo.com

ABSTRAK

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha tersebut antara lain pelaku usaha yang bergerak dibidang ekspor, impor dan antar area. Pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan pada tingkat ketaatan dalam mengikuti ketentuan administrasi dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah investigasi dan *profiling* pelaku usaha. Selanjutnya analisis data atas penilaian tersebut dilakukan dengan melalui melalui 2 cara yaitu : analisis mendalam terhadap nilai skoring dan perhitungan nilai indeks untuk masing-masing kelompok pertanyaan.. Hasil investigasi kemudian dianalisa secara deskriptif dalam bentuk gambar, tabel dan grafik. Secara umum, tingkat kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor dan antar area berada dalam kisaran tinggi.

Kata kunci: tingkat kepatuhan, komoditi perikanan, pelaku usaha, Sulawesi Selatan

Pendahuluan

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat kepatuhan. Kepatuhan (*compliance*) adalah tingkat perilaku seseorang dalam mengikuti suatu peraturan, spesifikasi, metode, standar yang telah ditetapkan dari suatu organisasi (Muchlas, 2005). Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 adalah mengukur kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai KKP sebagai suatu *outcome* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* serta *learning and growth perspective*.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari 76% pada tahun 2017, tahun 2018 menjadi 81% dan 87% di tahun 2019. IKU ini termasuk dalam *customer perspective* yang menjabarkan misi kedaulatan dengan sasaran strategis yang dicapai adalah terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya

kelautan dan perikanan. Capaian IKU ini diturunkan ke eselon I KKP termasuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Capaian IKU ini merupakan akumulasi dari empat indikator pembentuk yaitu: 1) Persentase kepatuhan pelaku usaha ekspor; 2) Persentase kepatuhan pelaku usaha impor; 3) Persentase kepatuhan pelaku usaha domestik keluar; dan 4) Persentase kepatuhan pelaku usaha domestik masuk.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perikanan cukup besar. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu "**Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional Dan Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat**". Gerakan ekspor tiga kali lipat untuk produk perikanan membuat optimisme dan harapan besar untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, harapan itu dapat terwujud jika dibarengi dengan kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku.

Keterlibatan semua pihak dalam bisnis perikanan mulai dari rantai produksi dan perdagangan produk perikanan adalah keniscayaan yang sangat mempengaruhi kondisi sumberdaya ikan Indonesia. Oleh karena itu, salah satu ujung tombak pengelolaan perikanan yang sangat dekat nelayan dan pembudidaya ikan adalah pelaku bisnis dan menjadi pihak yang sangat signifikan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Sehingga pemahaman bersama mengenai tata kelola dan keberlanjutan bisnis perikanan menjadi narasi utama yang perlu dibicarakan. Pelaku usaha perikanan sebagai pengambil manfaat langsung sumber daya laut mampu mendorong perubahan dalam pengelolaan dan manajemen perikanan yang akan berdampak kepada keseluruhan rantai perdagangan dan distribusi perikanan lokal dan nasional.

Penilaian kepatuhan pelaku usaha mengandung dua instrumen yaitu temuan administrasi dan temuan teknis. Temuan administrasi adalah temuan yang bersifat administrasi, proses pelayanan tetap dilanjutkan tanpa adanya tindakan karantina penolakan ataupun pemusnahan. Adapun temuan teknis/regulatif adalah temuan yang sifatnya melanggar unsur teknis dan regulatif dan tindakan karantina dilakukan adalah penolakan ataupun pemusnahan atau berdampak pelanggaran hukum (BKIPM,2019).

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha komoditi perikanan dengan pendekatan berbasis sertifikasi. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa tingkat kepatuhan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengakselerasi peningkatan ekspor produk perikanan di Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai Desember 2019 dan dilaksanakan di kota Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kota Makassar sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan

yang memiliki bandara sebagai pintu keluar komoditi perikanan dan Unit Pengolahan Ikan yang dimiliki pelaku usaha sebagai basis produksi.

Analisis Data

Penilaian tingkat kepatuhan menggunakan metode skala Likert sesuai dengan Juknis Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan BKIPM KKP. Adapun pengolahan data terhadap *profiling* pelaku usaha akan ditabulasi dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data (*spreadsheet*). Selanjutnya analisis data atas penilain tersebut dilakukan dengan melalui melalui 2 cara yaitu : 1) Analisis mendalam (*depth analysis*) terhadap nilai skoring dengan melakukan investigasi dan *profiling* pelaku usaha; dan 2) Perhitungan nilai indeks untuk masing-masing kelompok pertanyaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk gambar, tabel dan grafik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perhitungan nilai indeks, baik untuk menentukan kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk.

Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi terhadap kriteria penilaian analisa kepatuhan, dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan empat kelompok tingkat kepatuhan yaitu tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.. Tingkat kepatuhan dihitung berdasarkan jumlah temuan administrasi dan temuan teknis. Temuan administrasi adalah temuan yang bersifat administrasi, proses pelayanan tetap dilanjutkan tanpa adanya tindakan karantina penolakan ataupun pemusnahan. Adapun temuan teknis adalah temuan yang sifatnya melanggar unsur teknis dan regulatif dan tindakan karantina dilakukan adalah penolakan ataupun pemusnahan atau berdampak pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kategori Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Ekspor, Impor, Domestik Keluar dan Domestik Masuk

No	Tingkat Kepatuhan	Level Kepatuhan	Skala (%)	Temuan Adminisrasi	Temuan Teknis
1	Tinggi	4	81 - 100	≤ 3	0
2	Sedang	3	62 - 80	> 3	0
3	Rendah	2	42 – 61	> 0	≤ 2
4	Sangat Rendah	1	25 – 41	> 0	> 2

Berdasarkan Tabel 1, tingkat penilaian kepatuhan pelaku usaha dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu :

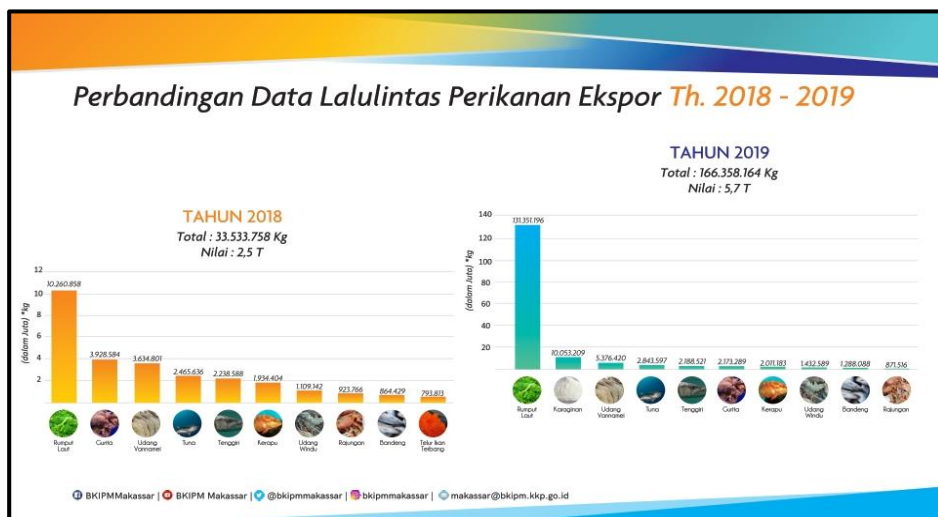
1. Tinggi, dengan rentang nilai $> 81\%$ apabila pelaku usaha taat dengan kesadaran sendiri secara sukarela dan mempunyai reputasi yang baik jika ditinjau dari profil pelaku usaha.
2. Sedang, dengan rentang nilai 62 – 80%, apabila dengan tidak sengaja akibat dari ketidaktahuan terhadap regulasi dan standar komoditas serta telah memperbaiki perilaku kepatuhannya dan tidak pernah melanggar regulasi.
3. Rendah, dengan rentang nilai 42 – 61%, apabila pelaku usaha yang resisten untuk patuh atau memanfaatkan kesempatan untuk tidak patuh, dan mengulangi pelanggarannya atau pelaku usaha yang dikenakan pembekuan dan tidak dapat menindaklanjuti hasil investigasi akibat adanya kejadian kasus penolakan ekspor.

4. Sangat rendah, dengan rentang nilai < 41%, apabila pelaku usaha yang dengan sengaja dan terbukti melanggar ketentuan regulasi serta dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Ekspor Sulawesi Selatan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kegiatan ekspor, impor maupun antar area di dalam wilayah Republik Indonesia sehingga ikan dan/atau hasil perikanan tersebut sehat, aman dan layak dikonsumsi serta tidak membahayakan lingkungan. Trend semacam ini dalam istilah internasional disebut dengan “One Health”. Adapun ekspor produk perikanan di Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir dan komoditi perikanan yang dominan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.



Gambar 1. Perbandingan data lalu lintas ekspor komoditi perikanan di Sulawesi Selatan tahun 2018 dan 2019

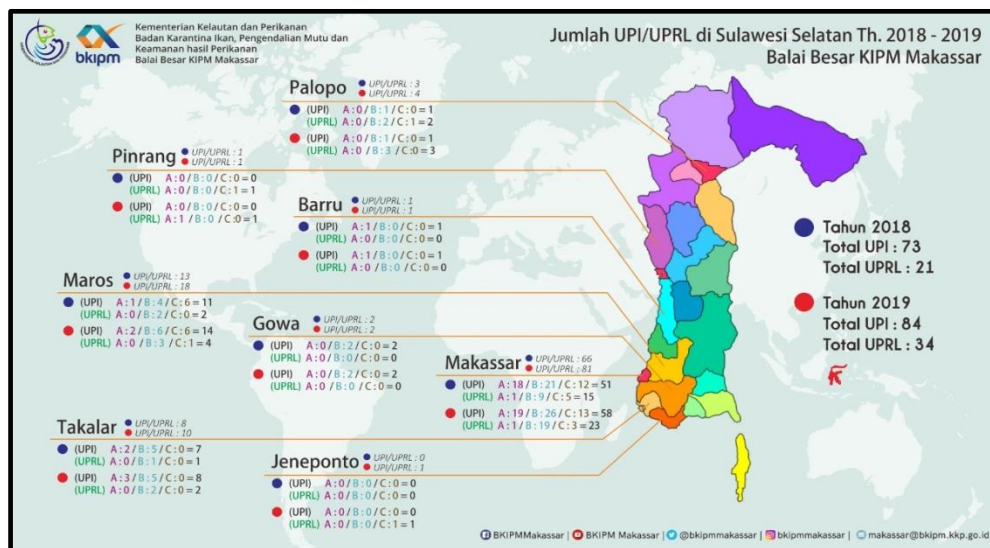


Gambar 2. Data lalu lintas ekspor komoditi perikanan dominan di Sulawesi Selatan tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1, kinerja ekspor produk perikanan Sulsel menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2018 ekspor produk perikanan sebanyak 33 juta ton dengan nilai 2,5 triliun meningkat di tahun 2019 dengan volume 166 juta ton dengan nilai 5,7 triliun. Gambar 2 menjelaskan tentang lima komoditas utama produk perikanan Sulsel untuk tahun 2019 yang didominasi oleh rumput laut, karaginan, udang vanamei, tuna dan gurita. Kenaikan ekspor yang signifikan ini disebabkan dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, maka ekspor seluruh jenis komoditi perikanan wajib dilengkapi *Health Certificate* dari BKIPM Makassar. Khusus komoditi rumput laut yang tadinya hanya menggunakan *Phitosanitary Certificate* untuk tujuan ekspor, dengan adanya ketentuan tersebut juga menggunakan *Health Certificate*.

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar merupakan lokus penelitian yang memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang mengekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Menurut BKIPM (2019), terjadi peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan dan Rumput Laut di Sulawesi Selatan yang telah memiliki sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sebagai salah satu persyaratan ekspor ke negara tujuan. Pelaku usaha untuk kegiatan lalu lintas domestik keluar dan domestik masuk juga mengalami peningkatan. Selain itu, kota Makassar memiliki posisi strategis karena memiliki bandara Sultan Hasanuddin dan pelabuhan laut Soekarno Hatta sebagai pintu pengeluaran untuk ekspor komoditi perikanan.



Gambar 3. Perbandingan jumlah pelaku usaha ekspor di Sulawesi Selatan tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan gambar 3, terjadi peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) di Sulawesi Selatan secara signifikan. Pada tahun 2018, terdapat 94 UPI/UPRL dan meningkat menjadi 118 unit di tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh iklim investasi yang semakin kondusif di Sulsel serta adanya kebijakan pemerintah yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Menurut Bappenas (2016), standar dan sertifikasi jaminan mutu industri perikanan diharapkan mampu menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Kepatuhan Pelaku Usaha

Sistem pemeriksaan media pembawa berdasarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha merupakan salah satu indikator penilaian kepatuhan. Penilaian kepatuhan didasarkan atas temuan administrasi dan temuan teknis. Tingkat kepatuhan tinggi jika pelaku usaha melanggar administrasi sebanyak ≤ 3 kali dan tidak ada temuan teknis. Tingkat kepatuhan sedang jika pelaku usaha melanggar administrasi sebanyak > 3 kali dan tidak ada temuan teknis. Tingkat kepatuhan rendah jika pelaku usaha melanggar administrasi sebanyak > 0 kali dan melanggar teknis ≤ 2 kali. Tingkat kepatuhan sangat rendah jika pelaku usaha melanggar administrasi sebanyak > 0 kali dan melanggar teknis > 2 kali. Adapun data jumlah pelaku usaha dan tingkat kepatuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan data jumlah dan tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Sulawesi Selatan tahun 2018 dan 2019

	2018		2019	
	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Pelaku Usaha	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Pelaku Usaha
Ekspor	93,15	96	98,12	118
Impor	97,14	5	99,16	7
Domestik Keluar	89,45	114	97,62	123
Domestik Masuk	98,18	53	99,81	70
Rerata	94,48	67	98,67	79,5

Sumber : BKIPM Makassar, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2, diperoleh gambaran tentang perbandingan nilai kepatuhan pelaku usaha dan jumlah pelaku usaha di Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir. Tingkat kepatuhan pelaku usaha di Sulawesi Selatan tergolong tinggi dan menunjukkan peningkatan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2018, rerata nilai kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk adalah 94,48 persen meningkat menjadi 98,67 persen di tahun 2019. Selain itu, rerata jumlah pelaku usaha ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk pada tahun 2018 adalah 67 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan secara umum profil pelaku usaha dan reputasinya cukup baik.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kepatuhan pelaku usaha antara lain pelaku usaha telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pengiriman komoditi perikanan, adanya mekanisme *reward and punishment* yang diberikan kepada pelaku usaha yang berprestasi maupun yang melanggar ketentuan serta adanya sosialisasi ketentuan regulasi yang dilaksanakan oleh BKIPM secara periodik baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahsun (2006) yang menyatakan bahwa kesadaran diri untuk mematuhi aturan merupakan tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Beberapa pelanggaran administrasi yang terjadi antara lain revisi/koreksi *Health Certificate* karena perubahan data alamat pengiriman, perubahan data pada tanggal keberangkatan, perubahan data pada deskripsi produk, dan kesalahan penginputan PPK Online. Adapun pelanggaran teknis yang biasa terjadi adalah penyalahgunaan dokumen

ekspor (*undertime*), pengiriman komoditi perikanan yang dilindungi, serta adanya penipuan ekonomi (*economic fraud*).

Indikator kepatuhan pelaku usaha melalui pendekatan sertifikasi merupakan salah satu solusi untuk mengurangi resiko terjadinya praktek-praktek perikanan yang tidak bertanggung jawab. Indikator ini memberikan motivasi dan komitmen kepada pelaku usaha untuk menunjukkan kinerja positif pada setiap rantai bisnis hasil perikanan secara sistematis dan konsisten.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : tingkat kepatuhan pelaku usaha di Sulawesi Selatan tergolong tinggi selama dua tahun terakhir . Pada tahun 2018, rerata nilai kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk adalah 94,48 persen meningkat menjadi 98,67 persen di tahun 2019. Adapun rerata jumlah pelaku usaha ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk pada tahun 2018 adalah 67 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2019. Selain itu, kinerja ekspor produk perikanan Sulsel menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2018 ekspor produk perikanan sebanyak 33 juta ton dengan nilai 2,5 triliun meningkat di tahun 2019 dengan volume 166 juta ton dengan nilai 5,7 triliun.

Berdasarkan data tingkat kepatuhan pelaku usaha di Sulawesi Selatan, maka kedepannya perlu dilakukan uji petik untuk mengetahui komitmen dan konsistensi pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan regulasi yang dilakukan secara periodik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang membantu data penelitian serta Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang membantu publikasi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- BKIPM. 2019. Manual Indikator Kinerja 2019. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 129 hlm.
- BKIPM, 2019. Laporan Kinerja BKIPM 2019. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 210 hlm.
- Bappenas, 2016. Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah. Kementerian PPN/Bappenas. 20 hlm.
- Mahsun, 2006. Metode Penelitian Bahasa : Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muchlas, M. 2005. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

